

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W.Widjaja. 2011 . *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers, Jakarta .
- Benny Bosu, SH.,CN. 1997. *Perkembangan Terbaru Sertifikat (Tanah, Tanggungan dan Condominium)*. PT. Mediatama Saptakarya. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- M.Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media, Yogyakarta.
- M.Tahir.1992. *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdeka Wati Djafar. 2018. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik – Edisi Ketiga*. Depok : Raja Grafindo Persada,
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Phillipus M.Hadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. UGM Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Soejono dan H.Abdurrahman. 2003 . *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Edisi Pertama*. Rajawali Pers. Jakarta.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenada Media Group. Jakarta.

Jurnal

Alan wonggow.,v.ilat., D.Affandi, 2014. "Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007" Jurnal Emba, Vol.2 No.1

Indri Hadisiswati. 2014. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah". Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1 .

Ivan Setiadi, Anhulaila M.Palampanga dan Nina Yusnita. 2018,"Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Donggala". Jurnal Katalogis, Vol. 6. Hlm. 10

Kartika Amiri, 2015. " Pengelolaan Barang Milik Negara Secara *akuntable* Menuju *Good Governance*". Potret Pemikiran, Vol. 20

M. Ilham Arisaputra, M Ashri,Kasman Abdullah, Dian Utami Mas Bakar. 2017. "Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Sertifikat"Jurnal Mimbar Hukum, Vol 29 No 2.

Ria Ayu Novita, dkk, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Risma Saragih, 2017,"Efektifitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan",JAP,Vol 7.

Rusadi Kantaprawira.1998. Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Sri Susyanti Nur. 2015. " Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah". Hasanuddin Law Review. Vol. 1 No. 1

Septianingsih S R, 2015 " Studi Tentang Pelayanan Penerbitan Sertifikat tanah di kantor Pertanahan Kota Samarinda" e-jurnal Ilmu Pemerintahan vol 3 hlm. 268

Urip Santoso, 2013,"Kewenangan Pemerinttah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah". Jurnal Dinamika Hukuuum, Vol.13 . hlm. 105

Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko H, 2008 " Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Alasan

Catat Yuridis Dalam Aspek Wewenang”, Jurnal Era Hukum, Jakarta
Fakultas Hukum Tarumanagara. Nomor 3 Tahun 15

Internet

SindoNews.Banyak Aset Milik Pemkab Tidak Bersertifikat SHM. Jumat, 17
Desember 2021. di Akses pada 11 Januari 2022

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara

Undang – Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman
Pengelolaan Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
tentang tata cara penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas
Tanah

Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017
tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo